

Analisis Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji di Malaysia, Turki, Pakistan, dan Indonesia

Analisis Legislatif Ahli Madya

Dr. Achmad Muchaddam Fahham, S.Ag., M.A.

achmad.fahhami@dpr.go.id

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Tri Rini Puji Lestari., S.K.M, M.Kes.

Drs. Ahmad Budiman., M.Pd.

Ringkasan

Kajian ini membandingkan sistem penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan sebagai pembelajaran bagi Indonesia. Malaysia mengelola haji secara terintegrasi melalui Tabung Haji yang mencakup tabungan syariah, layanan haji, serta digitalisasi penuh. Turki menerapkan sistem lotre dengan dominasi swasta di bawah regulasi Diyanet, sedangkan Pakistan memadukan skema subsidi dan reguler dengan pendaftaran daring dan sistem pengawasan ketat. Indonesia menghadapi antrean panjang hingga 45 tahun, sistem digitalisasi yang belum terintegrasi penuh, serta pelayanan yang belum optimal, terutama bagi lansia dan jemaah rentan. Kajian merekomendasikan reformasi kelembagaan, sistem kuota dan antrean berbasis kesiapan finansial dan prioritas usia, digitalisasi terpadu, serta peningkatan standar layanan kesehatan dan akomodasi. Transplantasi model Malaysia dan Turki dapat menginspirasi pembentukan badan haji terpadu yang efisien, transparan, dan inklusif.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Makkah untuk menunaikan ibadah haji, menjadikannya salah satu peristiwa keagamaan terbesar di dunia. Namun, keterbatasan kapasitas tempat suci dan infrastruktur di Arab Saudi memerlukan pengaturan yang ketat. terkait jumlah jemaah yang dapat diberangkatkan dari tiap-tiap negara. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Arab Saudi menetapkan sistem kuota haji bagi setiap negara. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 1987, disepakati bahwa kuota haji ditentukan berdasarkan rasio 1:1.000 dari jumlah populasi Muslim di masing-masing negara ("Bertambah penduduk, DPR", 2016).

Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola kuota haji yang terbatas ini. Salah satu tantangan utama adalah panjangnya antrian calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji. Di Malaysia, misalnya, waktu tunggu bisa mencapai 63 tahun, sementara di Indonesia bervariasi, tergantung pada daerah asal calon jemaah ("Delapan Perbedaan Penyelenggaraan", 2014, par. 7). Selain itu, aspek efektivitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi isu strategis yang ke depan perlu ditangani secara sistematis dan komprehensif.

Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelenggarakan ibadah haji. Malaysia, misalnya, menerapkan sistem tabungan haji melalui Lembaga Tabung Haji yang memungkinkan calon jemaah menabung sebelum keberangkatan, sekaligus mengelola investasi dana haji secara produktif. Sementara itu, Turki mengandalkan sistem lotre yang memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap calon jemaah. Di Pakistan, sistem berbasis regulasi ketat diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji.

Selain itu, layanan kesehatan, transportasi, dan akomodasi merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji yang secara langsung berdampak pada kenyamanan, keselamatan, serta pengalaman spiritual jemaah selama berada di Tanah Suci. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Pakistan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani ketiga aspek tersebut. Malaysia menunjukkan komitmen kuat dalam pelayanan kesehatan dengan pemeriksaan pra-keberangkatan, vaksinasi wajib, serta tim medis pendamping di Arab Saudi (Tabung Haji Malaysia, 2022). Di Turki, pengelolaan layanan kesehatan bagi lebih dari 1,5 juta orang jemaah haji terdaftar pada tahun 2025 (Daily Sabah, 2024, par. 1) melibatkan koordinasi yang kompleks, yang dapat menyebabkan kesenjangan atau

keterlambatan dalam pemberian layanan. Pakistan masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama dalam akses obat kronis (Ministry of Religious Affair and Interfaith Harmony Government of Pakistan, 2023).

Dari segi transportasi, Malaysia mengatur penerbangan carter secara langsung melalui Tabung Haji (Tabung Haji Malaysia, 2022), sementara Turki lebih bergantung pada maskapai komersial dengan harga tinggi (Erdoğan, 2020). Pakistan menyediakan penerbangan ekonomi bersubsidi, namun jemaah reguler sering kali menghadapi keterbatasan dalam akomodasi (Ministry of Religious Affair and Interfaith Harmony Government of Pakistan, 2023). Dalam hal akomodasi, Malaysia menyiapkan 12 gedung di Mekah dan 3 gedung di Madinah (Tabung Haji, 2023), Turki terkadang menghadapi masalah ketertiban administrasi berupa penggunaan visa nonhaji (Turkish Minute, 2024, par. 4), serta Pakistan menghadapi tantangan dalam memberikan fasilitas memadai bagi jemaah di Arafah dan Mina (Soomro, 2025).

Mengingat adanya perbedaan sistem penyelenggaraan ibadah haji di berbagai negara, studi perbandingan kebijakan menjadi krusial untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan *Foreign Legislation Analysis* (FLA) dapat diterapkan untuk menganalisis regulasi dan strategi yang digunakan oleh negara lain dalam menyelenggarakan ibadah haji. Dengan memahami keunggulan dan tantangan dari masing-masing model pengelolaan, Indonesia dapat merancang strategi yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Reformasi kebijakan yang berbasis pada *best practices* internasional tidak hanya berpotensi memperpendek antrean, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memastikan keberangkatan jemaah yang lebih tertib, aman, dan terencana.

A.2. Fokus Permasalahan

Ketidakseimbangan antara alokasi kuota haji dan tingginya jumlah pendaftar menyebabkan antrean panjang hingga puluhan tahun di beberapa daerah se-Indonesia. Sistem antrean yang kurang efektif, terutama dalam menetapkan prioritas usia, sering kali tidak memperhitungkan kondisi kesehatan calon jemaah. Selain itu, peran pemerintah yang belum optimal serta dominasi sektor swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji turut memengaruhi akses dan kualitas layanan. Kenaikan biaya haji semakin memberatkan masyarakat, sementara transparansi pengelolaan masih menjadi tantangan utama.

FLA ini bertujuan untuk membandingkan sistem penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan, terutama dalam aspek kelembagaan, kuota, daftar tunggu, sistem pendaftaran, penerapan digitalisasi, pelayanan kesehatan, serta transportasi dan akomodasi.

A.3. Tujuan

Tujuan dari FLA ini adalah: (1) membandingkan sistem penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan dalam aspek kelembagaan, kuota, daftar tunggu, sistem pendaftaran, penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan, serta transportasi dan akomodasi; (2) mengevaluasi keunggulan dan tantangan dalam setiap sistem pengelolaan; serta (3) menyusun rekomendasi model kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan praktik terbaik dari negara lain.

A. 4. Metode

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis komparatif terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan, serta evaluasi kritis terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

B. PERBANDINGAN PENGATURAN

Malaysia, Turki, dan Pakistan dipilih karena sistem penyelenggaraan ibadah haji mereka menawarkan wawasan berharga bagi Indonesia. Malaysia memiliki Lembaga Tabung Haji yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah jemaah menabung dan mengakses layanan secara transparan. Turki menerapkan model berbasis sektor swasta dengan regulasi pemerintah yang dapat menjadi referensi dalam menjaga kualitas layanan. Pakistan menggunakan sistem subsidi untuk jemaah berpenghasilan rendah, relevan bagi Indonesia dalam memastikan akses yang lebih inklusif. Mengingat antrean haji di Indonesia bisa mencapai lebih dari 30 tahun, studi perbandingan ini bertujuan mengidentifikasi praktik terbaik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas ibadah haji.

Tabel 1.

Gambaran Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, Pakistan, dan Indonesia

	Indonesia	Malaysia	Turki	Pakistan
	BPKH (ke depan oleh BPH)	Lembaga Tabung Haji (LTH)	Diyanet İşleri Başkanlığı	Ministry of Religious Affairs (MoRA)
Dasar Hukum	mengelola dana haji Rp150 triliun, tetapi investasi masih terbatas pada surat utang. Pemerintah mendominasi, swasta hanya untuk haji khusus.	yaitu institusi semi-pemerintah Malaysia yang mengelola tabungan haji berbasis syariah sekaligus menyelenggarakan layanan haji terintegrasi, termasuk akomodasi, transportasi, dan bimbingan ibadah.	lembaga pemerintah Turki yang berperan sebagai regulator haji, sementara pelaksanaan operasional diserahkan kepada sektor swasta, dengan Diyanet tetap mengawasi standar pelayanan dan kepatuhan terhadap aturan ibadah.	bertanggung jawab atas regulasi dan penyelenggaraan haji melalui dua skema—subsidi dan reguler—dengan pengelolaan kuota, layanan, subsidi bagi jemaah kurang mampu, dan sistem antrean yang diatur pemerintah.

	Indonesia	Malaysia	Turki	Pakistan
Kuota	Kuota terbesar (221.000 jemaah/tahun) (Faizi, 2023). Kuota dibagi rata berdasarkan daftar tunggu, tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial. Antrean mencapai 30–45 tahun.	Kuota 28.000/tahun, diatur ketat berbasis usia prioritas (Ministry of Hajj and Umrah, 2023). Kuota hanya diberikan kepada yang sudah memiliki tabungan mencukupi.	80.000/tahun, 60% dialokasikan ke agen swasta (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023). Sistem lotre digunakan untuk seleksi jemaah, sehingga lebih adil dan tidak ada daftar tunggu ekstrem.	79.000/tahun, 50% untuk skema subsidi Sistem lotre digunakan untuk seleksi jemaah, sehingga lebih adil dan tidak ada daftar tunggu ekstrem.
Daftar Tunggu	Sangat panjang (bisa lebih dari 30 tahun). Sistem antrian berdasarkan urutan pendaftaran.	Sistem <i>online</i> dengan rata-rata tunggu 5–10 tahun (Tabung Haji Malaysia, 2022). Hanya yang memiliki dana cukup di Tabung Haji yang masuk daftar tunggu.	Pendaftaran dilakukan melalui Diyanet atau agen perjalanan resmi; sistem kuota nasional diterapkan. Tidak ada antrean resmi; kuota dijual melalui agen (Öztürk, 2020). Sistem lotre setiap tahun.	Dapat mengantre beberapa tahun karena kuota terbatas dan tingginya permintaan untuk haji. Sistem lotre + opsi Haji Swasta. Jemaah bisa memilih opsi yang lebih cepat melalui jalur swasta.
Sistem Pendaftaran	Pendaftaran dilakukan melalui sistem <i>online</i> dengan setoran awal dan nomor porsi yang menentukan antrean keberangkatan (BPKH, 2024).	Calon jemaah menyetor dana ke Tabung Haji dan mendaftar setelah mencapai jumlah tertentu; keberangkatan berdasarkan sistem kuota	Pendaftaran dilakukan melalui Diyanet atau agen perjalanan resmi; sistem kuota nasional diterapkan.	Pendaftaran dilakukan secara <i>online</i> melalui portal resmi pemerintah; sistem kuota dan undian diterapkan untuk menentukan jemaah yang berangkat.
Digitalisasi	Aplikasi Haji Pintar Informasi digital ada, tetapi belum terintegrasi penuh. Belum terintegrasi dengan sistem kesehatan Arab Saudi.	Aplikasi THIJARI untuk Tabung Haji (Tabungan Haji, 2022). Seluruh proses dari pendaftaran, tabungan, hingga keberangkatan berbasis digital.	Portal Hajj Info System untuk pendaftaran dan alokasi kuota, tetapi masih terkendala akses internet. Mengintegrasikan digitalisasi melalui portal e-Devlet untuk pendaftaran haji dan pembaruan data. Platform Nusuk memudahkan peziarah dalam merencanakan ibadah haji, termasuk penerbitan visa dan pemesanan layanan.	Aplikasi Pak Hajj memfasilitasi pendaftaran haji, pelacakan biaya, dan pengelolaan keluhan secara digital (Ministry of Information and Broadcasting Government of Pakistan, 2023). Proses seleksi jemaah dilakukan secara <i>online</i>, dan Portal Haji Ditjen Imigrasi & Paspor menyediakan fitur pengaduan terkait permasalahan paspor.

	Indonesia	Malaysia	Turki	Pakistan
Layanan Kesehatan	Kemenag RI memberlakukan pemeriksaan kesehatan ketat, termasuk tes kebugaran (Vitiara, 2023). Bekerja sama dengan 2 rumah sakit di Arab Saudi (Tarmizi, 2023)	Tabung Haji menyediakan pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan, vaksinasi wajib, dan tim medis pendamping di Arab Saudi. Setiap jemaah menerima asuransi kesehatan khusus haji yang mencakup layanan darurat (Tabung Haji, 2023).	Layanan kesehatan disediakan langsung oleh Diyanet (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023)	Layanan kesehatan bagi jemaah disediakan langsung oleh Diyanet İşleri Başkanlığı (Diyanet, 2023), dengan 400 petugas medis disiagakan di Mekah dan Madinah serta dukungan dari Saudi German Hospital untuk pelayanan kesehatan 24 jam (Soomro, 2025).
Transportasi dan Akomodasi	Penerbangan charter dari 14 embarkasi (Pratama, 2023). Akomodasi di Madinah ada sebanyak 104 hotel dengan kapasitas 216.232 jemaah, sedangkan di Makkah ada 169 hotel dengan kapasitas 218.647 jemaah haji (Darwati, 2024).	Tabung Haji menunjuk Malaysia Airlines Berhad (MAB) dan Saudia Airlines (SAUDIA) untuk penerbangan carter jemaah haji Malaysia. Di Makkah, disiapkan 12 gedung akomodasi dalam 4 zona dan di Madinah tersedia 3 gedung dalam 2 zona pengawasan (Tabung Haji Malaysia, 2023).	Mayoritas jemaah menggunakan maskapai komersial (Turkish Airlines) dengan harga tiket tinggi ($\pm$ \$1.500). Akomodasi sering dikeluhkan karena jarak jauh dari Masjidil Haram.	Skema Haji Pemerintah Pakistan 2025 menghadirkan berbagai peningkatan, termasuk pilihan kamar yang fleksibel, tenda Mina ber-AC dengan sofa bed berpembatas, akomodasi dekat Masjid Nabawi, dan transportasi modern

Sumber: BPKH, 2024; Darwati, 2024; Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023; Kemenag RI, 2023; Ministry of Hajj and Umrah, 2023; Ministry of Information and Broadcasting Government of Pakistan, 2023; Pratama, 2023; Tarmizi, 2023; Soomro, 2025; Tabung Haji Malaysia, 2023; Tabung Haji, 2022; Vitiara, 2023.

C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF

C.1. Evaluasi Kritis

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia oleh BPKH masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Salah satu masalah utama adalah sistem kuota yang berbasis daftar tunggu tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial calon jemaah menyebabkan antrean keberangkatan sangat panjang, mencapai 30 hingga 45 tahun, sehingga perlu dipertimbangkan skema prioritas berbasis usia atau kondisi kesehatan agar lebih adil dan efisien. Digitalisasi layanan melalui aplikasi Haji Pintar juga masih menghadapi kendala integrasi, terutama dalam konektivitas dengan sistem kesehatan Arab Saudi, padahal digitalisasi seharusnya mencakup rekam medis elektronik agar tenaga kesehatan di kedua negara dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Dari segi operasional, sistem penerbangan carter dari 11 embarkasi utama serta akomodasi di Aziziyah yang padat dengan rata-rata empat hingga enam orang

per kamar menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi transportasi dan peningkatan standar fasilitas, terutama bagi lansia serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dengan berbagai tantangan tersebut, reformasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam aspek diversifikasi investasi, perbaikan sistem antrean, optimalisasi digitalisasi, serta peningkatan infrastruktur dan layanan guna memastikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.

Penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan memiliki karakteristik unik yang mencerminkan pendekatan kebijakan masing-masing negara. Di Malaysia penyelenggaraan haji dikelola oleh Lembaga Tabung Haji (LTH), lembaga tersebut tidak saja mengelola dana haji tapi juga mengelola penyelenggaraan ibadah haji mulai pendaftaran, pemberangkatan, pemulangan hingga pembinaan jemaah haji. Di Turki, penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah kendali Diyanet İşleri Başkanlığı yang berfungsi sebagai regulator, sementara layanan operasional sebagian besar dikelola oleh sektor swasta dengan sistem lotre yang dianggap lebih adil tanpa antrean panjang. Pakistan, melalui Ministry of Religious Affairs (MoRA), mengelola dua skema haji, yakni subsidi dan reguler, dengan sistem lotre yang memberikan kesempatan lebih merata, meskipun antrean untuk jalur reguler masih cukup panjang. Dari aspek digitalisasi, Malaysia paling maju dengan aplikasi THIJARI yang mengintegrasikan seluruh proses haji, sementara Turki memanfaatkan aplikasi Pak Hajj dan portal e-Devlet untuk pelayanan digital, sedangkan Pakistan masih mengalami keterbatasan akses internet dalam pengelolaan digitalnya. Evaluasi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di ketiga negara memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efisien dan adil.

C.2. Analisis Prediktif

Melihat tren kebijakan saat ini serta praktik yang diterapkan di negara lain, ada beberapa hal penting yang bisa diprediksi mengenai masa depan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia:

1. Kelembagaan

Ke depan, sistem pengelolaan haji di Indonesia kemungkinan besar akan lebih terintegrasi. Artinya, lembaga yang mengatur haji bukan hanya mengatur aturan (regulasi), tetapi juga menjalankan operasionalnya secara langsung, seperti yang dilakukan oleh LTH di Malaysia. Dalam hal ini, BPKH bisa saja diberi peran lebih besar untuk mengelola investasi dana haji, sementara Kementerian Agama tetap sebagai penentu kebijakan. Perubahan ini bisa membuat pengelolaan haji lebih efisien dan transparan, meskipun mungkin akan menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang selama ini memiliki kewenangan. Sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan akan dikelola oleh Badan Penyelenggara

Haji (BPH) sebuah lembaga baru yang dibentuk Presiden untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Sementara keuangan haji tetap dikelola oleh BPKH. Kementerian agama berperan sebagai regulator, BPH sebagai operator, dan BPKH sebagai pengelola keuangan haji.

2. Kuota Haji dan Daftar tunggu

Jumlah kuota haji untuk Indonesia bisa saja bertambah, terutama jika hubungan diplomatik dengan Arab Saudi semakin baik. Namun, karena negara lain juga berlomba-lomba meminta kuota, maka persaingan tetap menjadi tantangan. Indonesia bisa mencontoh sistem di Turki yang membagi kuota dengan lebih terbuka dan melibatkan swasta, sehingga layanan bisa lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Tapi perlu diingat, kuota yang besar saja tidak cukup—selama sistem antrean belum diperbaiki, antrean panjang tetap akan terjadi. Saat ini, calon jemaah haji harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat. Untuk mengurangi waktu tunggu ini, Indonesia bisa meniru Malaysia yang hanya memasukkan calon jemaah ke dalam daftar antrean setelah mereka memiliki dana yang cukup. Dengan begitu, hanya yang benar-benar siap yang tercatat dalam sistem. Sistem ini juga bisa diikuti dengan kebijakan prioritas usia atau kondisi kesehatan. Meski lebih adil, penerapannya butuh sosialisasi yang masif agar masyarakat bisa menerima perubahan tersebut.

3. Sistem Pendaftaran

Pendaftaran haji kemungkinan besar akan dilakukan secara digital sepenuhnya. Ke depan, sistem pendaftaran bisa terhubung langsung dengan bank, Kementerian Agama, dan operator perjalanan haji. Pakistan, misalnya, membagi pendaftaran menjadi dua jalur: reguler dan subsidi, sehingga masyarakat bisa memilih sesuai kemampuan ekonominya. Namun, infrastruktur digital di daerah dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

4. Digitalisasi Layanan Haji

Indonesia bisa mengembangkan sistem digital seperti di Turki yang sudah menggunakan aplikasi terpadu untuk memantau jadwal keberangkatan, lokasi hotel, layanan kesehatan, hingga waktu ibadah. Hal ini membuat pengalaman jemaah menjadi lebih tertata dan nyaman. Tapi perlu diperhatikan, sistem digital ini juga harus bisa terhubung dengan sistem di Arab Saudi agar informasi seperti data kesehatan bisa digunakan oleh tenaga medis di sana.

5. Layanan Kesehatan

Indonesia sudah menerapkan pemeriksaan kesehatan ketat sebelum keberangkatan. Namun, sistem rekam medis jemaah belum terhubung dengan rumah sakit di Arab Saudi. Hal ini bisa menyulitkan penanganan darurat saat di Tanah Suci. Malaysia, misalnya, sudah menyediakan asuransi kesehatan khusus dan tim medis pendamping, sementara Turki disediakan langsung oleh Diyanet.

Indonesia perlu memperkuat perlindungan kesehatan jemaah, terutama yang lanjut usia atau memiliki penyakit kronis.

6. Transportasi dan Akomodasi

Saat ini, jemaah haji Indonesia masih menghadapi masalah dalam transportasi dan penginapan. Penerbangan hanya tersedia dari beberapa kota besar (embarkasi), sehingga sering terjadi penumpukan. Penginapan di Makkah pun sering kali penuh dan sempit. Turki melibatkan sektor swasta untuk mengelola layanan ini, tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah. Sementara Malaysia bekerja sama dengan hotel bintang tiga atau empat yang dipesan jauh hari sebelumnya. Indonesia bisa belajar dari kedua negara ini untuk memperbaiki kenyamanan dan keamanan jemaah, terutama bagi yang sudah lanjut usia atau memiliki kebutuhan khusus.

D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN

D.1. Analisis Transplantasi Hukum

Transplantasi hukum adalah proses mengadopsi peraturan atau sistem dari negara lain ke dalam sistem nasional, dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di negara penerima. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mempelajari dan, bila relevan, menyesuaikan model penyelenggaraan ibadah haji dari Malaysia, Turki, dan Pakistan untuk memperkuat kebijakan haji nasional.

1. Pengelolaan Kelembagaan

Indonesia memiliki peluang untuk meniru sistem seperti LTH di Malaysia, yang menggabungkan fungsi pengelolaan keuangan syariah dengan penyelenggaraan haji secara terintegrasi. Agar bisa diterapkan di Indonesia, model ini perlu disesuaikan, misalnya melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta yang lebih solid, serta peraturan yang menjamin sinergi antar lembaga agar sistem berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lokal.

2. Kuota dan Daftar Tunggu

Turki memiliki sistem pembagian kuota haji yang lebih terbuka dan transparan, yang bisa dijadikan contoh untuk memperbaiki sistem antrean di Indonesia. Namun, karena jumlah calon jemaah di Indonesia sangat besar dan tersebar, penerapan sistem ini perlu disesuaikan dengan karakter wilayah dan jumlah penduduk. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan keterbukaan akses bagi semua jemaah. Hingga saat ini harus diakui bahwa belum ada sistem yang bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan persoalan daftar tunggu yang terjadi di Indonesia. Negara-negara seperti Turki, Malaysia, Pakistan dan India juga mengalami daftar tunggu jemaah haji meskipun jumlah jemaah tunggu di masing-masing negara tersebut berbeda-beda. Meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia bukan solusi, sebab penambahan kuota bisa jadi melahirkan masalah baru bagi

penyelenggaraan ibadah haji, terutama masalah-masalah dalam pelayanan transportasi, akomodasi, katering, dan pembinaan jemaah haji.

3. Sistem Pendaftaran

Pengalaman Turki dalam menerapkan sistem pendaftaran haji secara digital menunjukkan bahwa teknologi dapat menyederhanakan proses bagi calon jemaah. Indonesia bisa mengikuti jejak ini, dengan catatan perlu ada peningkatan jaringan internet dan infrastruktur digital di seluruh daerah. Selain itu, pendekatan harus disesuaikan dengan kebiasaan dan kemampuan masyarakat agar mudah diterima.

4. Digitalisasi Pelayanan

Indonesia perlu mengatur secara jelas penggunaan teknologi digital dalam pelayanan haji. Sistem seperti di Turki, yang memungkinkan jemaah melihat jadwal, akomodasi, dan layanan secara langsung (*real-time*), bisa diadopsi. Regulasi nasional harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran, pemantauan kesehatan, hingga pengaduan jemaah. Namun, penerapannya harus dilakukan bertahap, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kecocokan dengan sistem di Arab Saudi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Pakistan menerapkan sistem pengawasan yang kuat dalam penyelenggaraan hajinya. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari sini untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab publik dalam setiap proses, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan. Namun, sistem pengawasan yang digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi birokrasi dan kapasitas lembaga di Indonesia.

6. Layanan Kesehatan

Malaysia memberikan layanan kesehatan haji yang cukup lengkap—mulai dari pemeriksaan dan vaksinasi, hingga pengiriman tim medis dan pemberian asuransi. Indonesia dapat mengembangkan sistem serupa dengan cara memperkuat pengaturan soal asuransi kesehatan haji, meningkatkan fasilitas teknologi kesehatan, serta menyambungkan data medis jemaah ke sistem rumah sakit di Arab Saudi.

7. Transportasi dan Akomodasi

Malaysia dan Turki punya pendekatan berbeda dalam pengelolaan transportasi dan tempat tinggal jemaah, tapi keduanya bisa jadi rujukan bagi Indonesia. Malaysia lebih terencana dengan pemesanan jauh hari dan kerja sama dengan hotel-hotel berkualitas, sementara Turki melibatkan sektor swasta tapi tetap dalam kendali pemerintah. Indonesia dapat menggabungkan keunggulan kedua pendekatan ini, dengan memastikan ada pengaturan yang fleksibel, digitalisasi sistem reservasi, serta pelayanan khusus bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas agar lebih inklusif.

D.2. Opsi Rekomendasi Model Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis perbandingan dengan Malaysia, Turki, dan Pakistan, terdapat sejumlah pilihan kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk memperkuat sistem penyelenggaraan ibadah haji. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan, sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh calon jemaah.

Rekomendasi berikut merupakan usulan muatan substansi yang dapat dimasukkan secara eksplisit ke dalam revisi undang-undang:

1. Kelembagaan

Perlu dibentuk Badan Haji Terpadu yang menggabungkan fungsi pengatur (regulasi) dan pelaksana (operasional) haji dalam satu lembaga. Badan ini bertugas mengelola dana, mengatur pendaftaran, membagi kuota, serta mengoordinasikan pelayanan jemaah. Supaya tidak tumpang tindih, kerja sama dan pembagian tugas yang jelas dengan Kementerian Agama harus diatur secara tegas dalam undang-undang.

2. Kuota Haji dan Daftar Tunggu

Pengalokasian kuota sebaiknya tidak hanya berdasarkan urutan pendaftaran, tetapi juga memperhitungkan usia dan kondisi kesehatan calon jemaah. Perlu dibuat sistem poin atau prioritas khusus untuk lansia dan penyandang penyakit tertentu. Selain itu, pembagian kuota hingga ke tingkat daerah harus dilakukan secara transparan dan diawasi ketat untuk mencegah penyimpangan. Indonesia juga dapat mempertimbangkan pelibatan swasta yang teregulasi untuk meningkatkan kapasitas layanan, seperti dilakukan di Turki. Sebelum masuk daftar tunggu, calon jemaah sebaiknya diwajibkan menunjukkan kesiapan finansial. Hal ini bisa berupa kepemilikan dana minimum dalam rekening khusus haji yang sudah terhubung dengan sistem pendaftaran. Selain itu, perlu disiapkan jalur percepatan bagi kelompok prioritas, seperti lansia atau yang memiliki keterbatasan fisik, dengan kriteria yang jelas dan adil.

3. Sistem Pendaftaran

Sistem pendaftaran haji harus dikembangkan secara digital dan terintegrasi, mencakup proses pendaftaran, pembayaran, hingga pelacakan status keberangkatan. Data calon jemaah harus distandarisasi dan dapat diakses lintas sistem oleh bank, Kementerian Agama, dan pihak penyelenggara lainnya. Sebagai opsi, Indonesia bisa mengadopsi dua jalur pendaftaran: reguler dan subsidi, seperti yang diterapkan di Pakistan, agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapat kesempatan.

4. Digitalisasi Layanan Haji

Digitalisasi perlu menjadi pilar utama reformasi layanan haji. Pengembangan aplikasi seperti Haji Pintar harus dilanjutkan dan diperluas fungsinya, misalnya untuk menyediakan informasi *real-time* tentang jadwal, hotel, layanan kesehatan,

dan status dokumen. Fitur lain seperti transaksi nontunai, peta lokasi, panduan ibadah, dan pengaduan juga perlu diintegrasikan. Untuk mendukung ini, pelatihan digital bagi jemaah—terutama lansia—sangat penting. Selain itu, keamanan data pribadi seperti paspor dan rekam medis harus dijamin melalui sistem keamanan siber yang kuat.

5. Aksesibilitas dan Inklusi

Perlu diatur skema subsidi khusus bagi jemaah kurang mampu, dengan mekanisme penyaluran yang akurat dan adil. Selain itu, seluruh aspek layanan haji—transportasi, penginapan, kesehatan, hingga ibadah—harus menyediakan fasilitas ramah lansia dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi lokal juga penting untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada jemaah.

6. Layanan Kesehatan Haji

Wajib ditetapkan dalam UU bahwa semua calon jemaah harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi sebelum berangkat. Selain itu, penyediaan tim medis di Arab Saudi dan asuransi kesehatan khusus haji juga harus dijamin. Untuk mempercepat penanganan medis, sistem rekam medis jemaah perlu disambungkan dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Standar layanan kesehatan minimum bagi jemaah juga perlu ditetapkan dalam regulasi.

7. Transportasi dan Akomodasi

Penerbangan carter dari berbagai embarkasi harus dikoordinasikan dengan lebih baik agar jemaah tidak menumpuk di beberapa titik saja. Selain itu, akomodasi harus memenuhi standar minimum terkait jarak ke Masjidil Haram, kapasitas kamar, dan fasilitas pendukung—terutama bagi lansia. Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor swasta yang diawasi pemerintah untuk memastikan akomodasi berkualitas. Pemesanan hotel juga perlu dilakukan jauh hari untuk mendapatkan harga dan layanan terbaik.

E. PENUTUP

Sistem penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan memiliki pendekatan yang berbeda dalam aspek kelembagaan, kuota, pendaftaran, digitalisasi, pelayanan kesehatan, serta transportasi dan akomodasi. Malaysia menerapkan Lembaga Tabung Haji yang memungkinkan jemaah menabung dan mengakses layanan secara transparan. Turki mengadopsi sistem lotre dalam distribusi kuota serta melibatkan sektor swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, Pakistan menonjol dalam penerapan regulasi yang ketat untuk transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur layanan.

Evaluasi terhadap ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kendala. Malaysia masih menghadapi antrean panjang. Turki menawarkan transparansi dalam sistem kuota, meski implementasinya menuntut

koordinasi ketat. Pakistan memberikan aksesibilitas lebih luas bagi jemaah miskin melalui skema subsidi, namun masih menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan transportasi dan akomodasi yang efisien. Analisis ini memberikan wawasan berharga mengenai berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan pembelajaran dari ketiga negara, Indonesia dapat mengadopsi model kelembagaan terpadu seperti di Malaysia, meningkatkan transparansi sistem antrean dan kuota sebagaimana di Turki. Selain itu, pemanfaatan digitalisasi dalam proses pendaftaran dan layanan, termasuk integrasi rekam medis elektronik, dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan jemaah. Dengan penyesuaian yang tepat, Indonesia dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji agar lebih efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan jemaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2023). *Laporan keuangan BPKH 2023*. bpkh.go.id. <https://bpkh.go.id/laporan-keuangan-bpkh/>
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2024, November 21). *Cara Cek Nomor Porsi Keberangkatan Jamaah Haji dan Estimasi Keberangkatannya*. BPKH. <https://bpkh.go.id/cara-cek-nomor-porsi-keberangkatan-jamaah-haji/>
- Bertambah penduduk, DPR dorong pemerintah minta tambahan kuota ke Arab Saudi*. (2016, September 4). Kemenag.go.id. <https://kemenag.go.id/nasional/bertambah-penduduk-dpr-dorong-pemerintah-minta-tambahan-kuota-ke-arab-saudi-r4oj5m>
- Daily Sabah. (2024, September 12). Over 1.5 M in Türkiye renew Hajj registrations for 2025. *Daily Sabah*. <https://www.dailysabah.com/turkiye/over-15-m-in-turkiye-renew-hajj-registrations-for-2025/news>
- Darwati, E. (2024, Mei 20). Kemenag pastikan akomodasi jemaah terpenuhi selama haji 2024. *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240520/15/1767074/kemenag-pastikan-akomodasi-jemaah-terpenuhi-selama-haji-2024>
- Delapan perbedaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dan Malaysia*. (2014, Oktober 14). Kemenag.go.id. <https://kemenag.go.id/nasional/delapan-perbedaan-penyelenggaraan-haji-indonesia-dan-malaysia-56ptzi>
- Diyanet İşleri Başkanlığı. (2023). *2023 Hac raporu*. diyanet.gov.tr. <https://diyanet.gov.tr/>
- General Authority for Statistics. (2023). *Hajj statistics 2023*. General Authority for Statistics. <https://www.stats.gov.sa/documents/20117/2435259/Hajj+Statistics+2023+EN.pdf>
- Kementerian Kesehatan Malaysia. (2023). *Laporan kesihatan haji 2023*. Portal Rasmi Kementerian Kesehatan Malaysia. <https://www.moh.gov.my/>
- Ministry of Hajj and Umrah. (2023). *Hajj quota allocation report*. haj.gov.sa. <https://haj.gov.sa>

- Ministry of Information and Broadcasting Government of Pakistan. (2023, Desember 20). *Pak-Hajj App launched to facilitate Pakistani pilgrims during next year Hajj*. Ministry of Information and Broadcasting. <https://www.moib.gov.pk/News/59147#:~:text=He%20lauded%20efforts%20of%20the,and%20manage%20these%20requests%20efficiently>
- Ministry of Religious Affair and Interfaith Harmony Government of Pakistan. (2023). *Hajj report 2023*. mora.gov.pk. <https://www.mora.gov.pk/hajj-report-2023>
- Pratama, G. (2023, November 14). Daftar 14 embarkasi yang akan digunakan Penyelenggaraan Haji 2024. Infobanknews. <https://infobanknews.com/daftar-14-embarkasi-yang-akan-digunakan-penyelenggaraan-haji-2024/>
- Soomro, A. W. (2025, Mei 19). Hajj 2025: A journey of faith, comfort, and care. *The Express Tribune*. <https://tribune.com.pk/story/2546644/hajj-2025-a-journey-of-faith-comfort-and-care>
- Tabung Haji. (2023). *Memenuhi aspirasi [Laporan Tahunan 2023]*. Tabung Haji. https://prod-th-assets.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/press-release/0/2024-10-16/TH_AR23_19.07_compressed.pdf
- Tabung Haji Malaysia. (2022). *Laporan pelaksanaan haji 2022 [Report]*. Tabung Haji. https://prod-th-assets.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/tab-content/0/2023-11-16/TH_AR22_25.10.pdf?
- Tarmizi, S. N. (2023, Mei 26). Dua rumah sakit Arab Saudi di Madinah siap layani jemaah haji Indonesia. Sehat Negeriku Kemenkes. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230526/4943089/dua-rumah-sakit-arab-saudi-di-madinah-siap-layani-jemaah-haji-indonesia/>
- Turkish Minute. (2024, Juni 14). Saudi Arabia deports thousands of Turkish pilgrims above quota after complaints by Diyanet. *Turkish Minute*. <https://turkishminute.com/2024/06/14/saudi-arabia-deports-thousands-of-turkish-pilgrims-above-quota-after-complaints-by-diyanet>
- Vitiara, M. B. (2023, Oktober 6). *Perketat istitha'ah kesehatan, jemaah haji akan jalani pemeriksaan fisik dan psikologis*. Haji Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/perketat-istitha-ah-kesehatan-jemaah-haji-akan-jalani-pemeriksaan-fisik-dan-psikologis>

ANALISIS SISTEM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI MALAYSIA, TURKI, DAN PAKISTAN

PERMASALAHAN

1. Ketidakseimbangan antara alokasi kuota haji dan tingginya jumlah pendaftar menyebabkan antrian panjang hingga puluhan tahun.
2. Sistem antrian yang kurang efektif, tidak memperhitungkan kondisi kesehatan calon jemaah.
3. Peran pemerintah yang belum optimal serta dominasi sektor swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji turut memengaruhi akses dan kualitas layanan.

METODE ANALISIS

1. Membandingkan sistem penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia, Turki, dan Pakistan dalam aspek kelembagaan, kuota, daftar tunggu, sistem pendaftaran, penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan, serta transportasi dan akomodasi.
2. Mengevaluasi keunggulan dan tantangan dalam setiap sistem pengelolaan.
3. Menyusun rekomendasi model kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia.

PERBANDINGAN PENGATURAN



MALAYSIA

memiliki Lembaga Tabung Haji yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah jemaah menabung dan mengakses layanan secara transparan



TURKI

menerapkan model berbasis sektor swasta dengan regulasi pemerintah yang dapat menjadi referensi dalam menjaga kualitas layanan



PAKISTAN

menggunakan sistem subsidi untuk jemaah berpenghasilan rendah, relevan bagi Indonesia dalam memastikan akses yang lebih inklusif.

OPSI REKOMENDASI MODEL KEBIJAKAN

KELEMBAGAAN

Perlu dibentuk *Badan Haji Terpadu* yang menggabungkan fungsi pengatur (regulasi) dan pelaksana (operasional) haji dalam satu lembaga.

KUOTA HAJI DAN DAFTAR TUNGGU

Tidak hanya berdasarkan urutan pendaftaran, tetapi juga memperhitungkan usia dan kondisi kesehatan calon Jemaah, sehingga perlu dibuat sistem poin atau prioritas khusus untuk lansia dan penyandang penyakit tertentu.

SISTEM PENDAFTARAN

Dikembangkan secara digital dan terintegrasi, mencakup proses pendaftaran, pembayaran, hingga pelacakan status keberangkatan.

DIGITALISASI LAYANAN HAJI

Pengembangan aplikasi *Haji Pintar* harus dilanjutkan dan diperluas fungsinya.

AKSESIBILITAS DAN INKLUSI

Perlu diatur skema subsidi khusus bagi jemaah kurang mampu.

LAYANAN KESEHATAN HAJI

Sistem rekam medis jemaah perlu disambungkan dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi.

TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

Penerbangan carter dari berbagai embarkasi harus dikoordinasikan dengan lebih baik, serta akomodasi harus memenuhi standar.